



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI SELAYAR
JL. KELAPA NO. 7 BENTENG KAB. KEPULAUAN SELAYAR 92812
TELP. 0414-21030, 21363 FAX 0414-21778
<http://www.pn-selayar.go.id> e-mail: pnslr@pn-selayar.go.id

Nomor : 41/Akta Pid.Sus/2018/PN Slr.

Pada hari ini Senin tanggal 3 September 2018 ;

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : JAYA HIDAYAT ;

Jabatan : Jurusita Pengadilan Negeri Selayar ;

Telah memberitahukan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal 15 Agustus 2018
No. 409/PID.SUS/2018/PT.MKS., atas nama Terdakwa ANDI TAMRIN Bin MASSERE
yang amar putusannya berbunyi :

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 2 Agustus 2018,
Nomor : 41/Pid.Sus/2018/PN Slr, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat
peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

K e p a d a :

1. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar, dengan menyampaikan salinan
putusan.
2. Nama lengkap : ANDI TAMRIN Bin MASSERE ;
Tempat lahir : Barugaia ;
Umur atau Tgl.lahir : 50 Tahun / 12 Mei 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Barugaia, Desa Barugaia, Kec. Bontomanai,
Kabupaten Kepulauan Selayar ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Kepala Desa ;

Dengan menyampaikan petikan putusannya.

Demikian akta ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Jurusita dan Penuntut Umum.

Penuntut Umum

Pengadilan Negeri Selayar
Jurusita

PUTUSAN

Nomor 409/PID.SUS//2018/PT. MKS



"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Nama	: ANDI TAMRIN Bin MASSERE ;
Tempat Lahir	: Barugaia ;
Umur / Tanggal lahir	: 50 Tahun / 12 Mei 1968 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Dsn Barugaia, Ds Barugaia, Kec. Bontomanai, Kab. Kepulauan Selayar ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Kepala Desa ;
Pendidikan	: SMEA (Tidak Tamat) ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa di persidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Agustus 2018 Nomor 409/PID.SUS.Anak/2018/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Agustus 2018 Nomor 409/PID.SUS.Anak/2018/PT.MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa ANDI TAMRIN BIN MASSERE selaku Kepala Desa Barugaia Kec. Bontomanai, Kab. Kep. Selayar berdasarkan Surat Bupati Kepulauan Selayar No. 685 / VIII / 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa Serta Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar Masa Bhakti 2013-2019, pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di Kantor Desa Barugaia Kec. Bontomanai, Kab. Kep. Selayar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar, dengan sengaja telah membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa selaku Kepala Desa Barugaia Kec. Bontomanai, Kab. Kep. Selayar berdasarkan Surat Bupati Kepulauan Selayar No. 685 / VIII / 2018 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa Serta Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar Masa Bhakti 2013-2019, telah membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon gubernur berupa menerbitkan undangan untuk masyarakat dalam rangka kampanye partai Golongan Karya dengan kepala surat Pemerintah Desa Barugaia tertanggal 8 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan pelaksanaan kegiatan hari Minggu tanggal 18 Juni 2018 jam 08.00 sampai dengan selesai, bertempat di belakang Puskesmas Barugaiya ;

Bahwa sesuai dengan undangan dari terdakwa kegiatanpun terlaksana dimana hadir pada waktu itu sebagi tamu undangan yaitu masyarakat Barugaia, sedangkan yang berkampanye dengan masyarakat pada waktu itu yaitu pengurus Partai Golkar Kabupaten Selayar yaitu sdr. BASLI ALI, SYAHRIR WAHAB dan INCE LANGKE ;



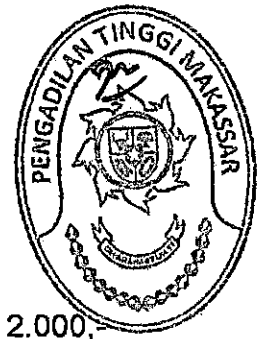
Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 1 yaitu Sdr. NURDIN HALID KAHAR ;

Bahwa selain terdakwa membuat undangan untuk acara kampanye dari partai Golkar tersebut, terdakwa juga membuat tindakan lain yaitu memberikan pinjaman kursi dan tenda pada hajatan tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo. Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang ;

Menimbang, bahwa Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ANDI TAMRIN Bin MASSERETERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo. Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah agar terdakwa langsung ditahan dan denda sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar foto berwarna situasi pada saat berlansungnya pelaksanaan kampanye ;



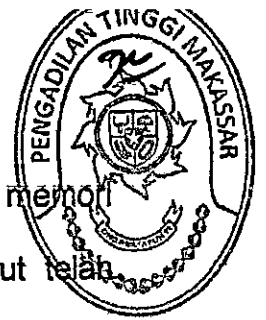
Desa Barugaia ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertamamenjatuhkan putusan dengan putusan Pengadilan Negeri Selayartanggal 2 Agustus 2018 Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN.Sir yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDI TAMRIN Bin MASSERE**telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*", sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Memerintahkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar foto berwarna situasi pada saat berlangsungnya pelaksanaan kampanye;
 - 1 (satu) lembar perihal undangan silaturrahi dengan kop Desa Barugaia yang dibubuhi tanda tangan Kepala Desa Barugaia serta menggunakan



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 3 Agustus 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2018. Sebagai berikut :

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar pada hari Jumattanggal 3 Agustus 2018 telah menyatakan banding, sehinggapernyataan banding kami sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati



dan Walikota menjadi Undang-undang. Atas putusan tersebut kami

Jaksa Penuntut Umum tidak sepaham dengan Putusan Majelis Hakim khususnya pidana penjara dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Menurut pendapat kami penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan

Kepada terdakwa oleh Majelis Hakim terlalu rendah, putusan yang

dijatuhkan tersebut tidak memberi efek jera dan pelajaran yang

berarti bagi pihak – pihak yang termuat dalam pasal 71 ayat (1)

undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang perubahan kedua

atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang–

undang. Oleh karena itu kami mohon supaya Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan supaya ;

1. Menerima permohonan banding kami ;
2. Merubah putusan Pengadilan Negeri Selayar.



Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah berkas perkara Nomor: 41/Pid.Sus/2018/PN.Slr, yang meliputi Berita Acara persidangan, memori banding dan salinan resmi putusan perkara tersebut, yang dijatuhkan pada tanggal 2 Agustus 2018, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum pembuktian dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinilai tepat dan benar, maka putusan Hakim pengadilan tingkat pertama yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon " sudah tepat dan benar karena dalam pertimbangan pembuktian unsur dakwaan sudah menguraikan semua keadaan dan alasan-alasannya sesuai fakta persidangan yang terjadi pada peradilan tingkat pertama sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Hakim pada Pengadilan Tinggi dan dianggap turut termuat dalam putusan ini, demikian juga pidana yang dijatuhkan sudah tepat, bersifat mendidik bagi terdakwa dan masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan serupa dikemudian hari., karena itu putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 41/Pid.Sus./2018/PN.Srl tanggal 2 Agustus 2018 dimohon banding tersebut dipertahankan untuk dikuatkan,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Walikota menjadi Undang-undang, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 2 Agustus 2018 No 41/Pid.Sus./2018/PN.Slr yang dimohonkan banding Tersebut.
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (Duaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari RABU tanggal 15 AGUSTUS 2018, oleh kami DR.JACK JOHANIS OCTAVIANUS SH.MH selaku Ketua Majelis Hakim, GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.M.Humcdandh AHMAD SHALIHIN, SH.MH. masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota Majelis Hakim dan disaksikan HJ. HANIAH YUSUF, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

ANGGOTA c MAJELIS c HAKIM,

t.t.d

GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.M.HUM

t.t.d

H.AHMAD SHALIHIN, SH.M.H

KETUA MAJELIS HAKIM,

t.t.d

DR.JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

MENGESAHKAN :

Salinan sesuai dengan Aslinya

Selayar, 30 Agustus 2020
Panitera Pengadilan Negeri Selayar

ANDI SURIADI SH
NIP. 19681231991031028